



**BerAKHLAK**  **bangga  
melayani  
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# RENCANA KERJA

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan**

**Tahun 2026**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan pertolongan dan kemudahan dari-Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini selain mempertimbangkan aspek-aspek pendekatan teknokratik juga sudah mengkolaborasikan pendekatan politis berupa Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Pekalongan Periode 2025-2029 dan pendekatan *bottom-up* dalam Musrenbang RKPD.

Hal yang paling mendasar adalah bahwa penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini telah berpedoman pada RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 yang sudah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dan dengan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan pada lingkup yang lebih luas, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah ataupun di tingkat Nasional.

Secara umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dalam 5 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III membahas tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan terakhir Bab V penutup.

Harapan kami, Dokumen ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Tak lupa kami mohon masukan kritik dan saran yang membangun demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Pekalongan, 4 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan



PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19700502 199501 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
..	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN YANG LALU</b>	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	61
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	66
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	68
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	68
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	83
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat rencana kegiatan pembangunan tahun 2026 yang dilampiri dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan 1 tahun berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan disusun sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota periode 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Kota Pekalongan lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan berlandaskan akhlakul karimah”, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mewujudkan pencapaian misi-1 yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan misi-4 yaitu Kesejahteraan Masyarakat.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 Tanggal 24 November 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sekretariat;
- f. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- g. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJM-P) Kota Pekalongan 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 (Berita Daerah Nomor 21 tanggal 4 Juli 2025).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2026 adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, sesuai sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPMPPA Kota Pekalongan Tahun 2026, adalah :

1. Untuk menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kota Pekalongan Tahun 2026;
2. Untuk menyediakan satu tolok ukur APBD Kota Pekalongan dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Untuk memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai tahun 2026 dalam rangkamewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2026-2029;
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran DPMPPA Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tahunan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 DPMPPA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

##### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan , sistematika penulisan.

##### **II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

##### **III. TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

##### **IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Rancangan Awal RENJA DPMPPA Kota Pekalongan tahun 2026 secara konsisten.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPMPPA Kota Pekalongan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPPA Kota Pekalongan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender</b>	<b>persen</b>	<b>11,09</b>	<b>5,55</b>	<b>5,98</b>	<b>7,39</b>	<b>19,09</b>	<b>19,09</b>	<b>172,14</b>	
<b>2</b>	<b>Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>47,58</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>66,68</b>	<b>66,68</b>	
3	Jumlah dokumen PPRG yang disusun	Dokumen	4,00	1,00	1,00					
4	Jumlah kegiatan Desk GAP GBS yang dilaksanakan	Kali	-	-	3,00					
5	Jumlah koordinasi pokja PUG yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
6	Jumlah koordinasi tim teknis PPRG yang dilaksanakan	Kali	-	-	2,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah				30,00	30,00	30,00	100,00	
8	<b>Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Persen</b>	<b>40,00</b>	<b>13,33</b>	<b>20,00</b>	<b>26,67</b>	<b>26,67</b>	<b>26,67</b>	<b>66,68</b>	
9	Jumlah kegiatan advokasi PUG yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00					
10	Jumlah kegiatan FGD PUG yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kelompok ekonomi perempuan yang dilaksanakan	Kali	-	-	27,00					
12	Jumlah kegiatan pelatihan Forkom Puspa yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
13	Jumlah kegiatan pelatihan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan	Kali	-	-	4,00					
14	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	4,00					
15	Jumlah Koordinasi Forkom Puspa yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
16	Jumlah Koordinasi Kelompok Ekonomi Perempuan yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				3,00	3,00	3,00	100,00	
18	<b>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
19	Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan yang dilaksanakan	Kali	100,00	20,00	20,00					
20	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga				1,00	1,00	1,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	15,01	33,08	15,01	15,01	18,46	18,46	81,32	
22	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	Jumlah kegiatan Kelas Pendidikan Keluarga yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
24	Jumlah Kegiatan Kelas Persiapan Pranikah yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
25	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Jumlah koordinasi Puspaga dengan Tim HIMPSI yang dilaksanakan	Kali	-	-	2,00					
27	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				10,00	10,00	10,00	100,00	
28	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
29	Jumlah kegiatan Case Conference Perempuan yang dilaksanakan	Kali	240,00	78,00	39,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang dilaksanakan	Kali	150,00	33,00	10,00					
31	Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan	Kali	190,00	68,00	48,00					
32	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan				30,00	107,00	107,00	356,67	
33	Persentase Dekelara (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55,56	29,63	33,33					
34	Persentase SRA (Sekolah Ramah Anak)	Persen	10,96	20,35	22,31					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan	Kelurahan	27,00	27,00	27,00					
36	Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan	Kali	12,00	-	1,00					
37	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	6,00					
38	Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA	Sekolah	60,00	16,00	20,00					
39	<b>Persentase forum anak yang aktif</b>	<b>Persen</b>	<b>40,63</b>	<b>12,50</b>	<b>15,63</b>	<b>28,13</b>	<b>28,13</b>	<b>28,13</b>	<b>69,23</b>	
40	Jumlah kegiatan pelatihan KHA yang dilaksanakan	Kali	5,00	3,00	2,00					
41	Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu	Kelompok	20,00	4,00	3,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				350,00	386,00	386,00	110,29	
43	Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00					
44	Jumlah kegiatan advokasi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
45	Jumlah kegiatan Pelatihan Forum Anak yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00					
46	Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	19,00					
47	Jumlah Koordinasi dengan Pendamping Forum Anak Kelurahan yang dilaksanakan	Kelurahan	-	-	1,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Jumlah koordinasi peningkatan kualitas hidup anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
49	Jumlah Koordinasi Peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
50	Jumlah Koordinasi Program Kerja Forum Anak Tingkat Kota yg dilaksanakan	Kali	-	-	15,00					
51	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembekalan agen perubahan di Sekolah Ramah Anak	Sekolah	-	-	9,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				5,00	5,00	5,00	100,00	
53	Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB	Kelompok	8,00	-	5,00					
54	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
55	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				3,00	3,00	3,00	100,00	
56	<b>persentase pengaduan kasus anak yang terlayani</b>	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
58	Jumlah kegiatan Pelatihan Program Roots yang dilaksanakan	Kali	1,00	-	1,00					
59	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan penghargaan Evaluasi PATBM yang dilaksanakan	Kelurahan	-	-	3,00					
60	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan				1,00	1,00	1,00	100,00	
61	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Jumlah kegiatan case conference kasus anak yang dilaksanakan	Kali	204,00	13,00	97,00					
63	Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga yang dilaksanakan	Kali	146,00	18,00	74,00					
64	Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	Kali	110,00	10,00	56,00					
65	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Formulasi	Orang				15,00	18,00	18,00	120,00	
66	<b>Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Jumlah dokumen naskah akademik UPTD PPA yang disusun	Dokumen	1,00	-	1,00					
68	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang				50,00	56,00	56,00	112,00	
69	<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
70	<b>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
71	Jumlah dokumen Renja yang disusun	Dokumen	10,00	2,00	2,00					
72	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				2,00	2,00	2,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Dokumen	10,00	2,00	2,00					
74	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				2,00	2,00	2,00	100,00	
75	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	Bulan	60,00	12,00	12,00					
76	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	Dokumen	20,00	4,00	4,00					
77	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	Dokumen	10,00	2,00	2,00					
78	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	Dokumen	25,00	5,00	5,00					
79	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen				15,00	15,00	15,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>80</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>81</b>	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	60,00	12,00	14,00					
<b>82</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				19,00	19,00	19,00	100,00	
<b>83</b>	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	<b>60,00</b>	<b>12,00</b>	12,00					
<b>84</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				12,00	12,00	12,00	100,00	
<b>85</b>	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Bulan	5,00	1,00	1,00					
<b>86</b>	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1,00	1,00	1,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	102,02	100,58	100,00	100,00	100,00	100,00	
88	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
89	Jumlah keikutsertaan dalam Karnaval Batik	Kali	10,00	1,00	1,00					
90	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket				1,00	1,00	1,00	100,00	
91	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100,00	106,05	101,75	100,00	100,00	100,00	100,00	
92	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	60,00	12,00	12,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				4,00	4,00	4,00	100,00	
94	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	Bulan	60,00	12,00	12,00					
95	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	64,00	10,00	4,00					
96	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				4,00	4,00	4,00	100,00	
97	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Bulan	60,00	12,00	12,00					
98	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				4,00	4,00	4,00	100,00	
99	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	55,00	11,00	11,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				4,00	4,00	4,00	100,00	
101	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60,00	12,00	12,00					
102	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				4,00	4,00	4,00	100,00	
103	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60,00	12,00	12,00					
104	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen				2,00	2,00	2,00	100,00	
105	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang/Kali	785,00	260,00	302,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				150,00	150,00	150,00	100,00	
107	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
108	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60,00	12,00	12,00					
109	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				4,00	4,00	4,00	100,00	
110	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60,00	12,00	12,00					
111	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				12,00	12,00	12,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Bulan	60,00	12,00	12,00					
113	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				12,00	12,00	12,00	100,00	
114	<b>Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
115	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	100,00	
116	Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional	Bulan	18,00	18,00	12,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				13,00	13,00	13,00	100,00	
118	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	Unit	2,00	1,00	1,00					
119	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				2,00	2,00	2,00	100,00	
120	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bulan	60,00	12,00	12,00					
121	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				69,00	69,00	69,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100,00	33,33	50,00	66,67	72,22	72,22	72,22	
123	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan	Persen	66,67	11,11	11,11	11,11	14,81	48,15	72,22	
124	Jumlah kelurahan yang difasilitasi kegiatan TMMD	Kelurahan	15,00	3,00	3,00					
125	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen				5,00	5,00	5,00	100,00	
126	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	Persen	92,59	74,07	81,48	85,51	88,89	88,89	96,00	
127	Persentase kinerja administrasi kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
128	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan	Kelurahan	15,00	1,00	3,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan yang disusun	Dokumen	5,00	3,00	1,00					
130	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen				2,00	2,00	2,00	100,00	
131	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Persen</b>	<b>97,82</b>	<b>96,79</b>	<b>97,64</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>	<b>99,86</b>	
132	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,68</b>	<b>100,00</b>	<b>109,09</b>	<b>109,09</b>	<b>109,09</b>	
133	Jumlah dokumen evaluasi pemberdayaan LKK yang disusun	Dokumen	10,00	2,00	2,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen				2,00	2,00	2,00	100,00	
135	Jumlah kegiatan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00					
136	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKK yang dilaksanakan	Kali	5,00	4,00	1,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga				3,00	3,00	3,00	100,00	
138	Jumlah inovator TTG yang terfasilitasi	Inovator	15,00	-	3,00					
139	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan				1,00	1,00	1,00	100,00	
140	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat	Kelurahan	15,00	-	3,00					
141	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti	Laporan				1,00	1,00	1,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gotong Royong Masyarakat									
142	Jumlah TP PKK Kelurahan binaan yang dibina	Kelurahan	40,00	8,00	8,00					
143	Jumlahbulan terfasilitasinya kegiatan TP PKK Kota Pekalongan	Bulan	60,00	12,00	12,00					
144	Jumlah kegiatan Bintek pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00					
145	Jumlah kegiatan pelatihan digital marketing yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
146	Jumlah kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah plastik yang dilaksanakan	Kali	5,00	1,00	1,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Gagah (Tanggap dan Tangguh) bencana tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan	-	-	4,00					
148	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kelurahan Ramah Anak yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
149	Jumlah Kegiatan Pelatihan TP3 PKK yang dilaksanakan	Kali	6,00	2,00	1,00					
150	Jumlah Kelompok Bank Sampah yang mendapat penghargaan lomba Bank Sampah	TP PKK Kelurahan	20,00	4,00	3,00					
151	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK	TP PKK Kelurahan	15,00	4,00	3,00					

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK	TP PKK Kelurahan	15,00	4,00	3,00					
153	Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Beberan dan Simulasi Pola Asuh	TP PKK Kelurahan	15,00	4,00	3,00					
154	Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K PKK	TP PKK Kelurahan	15,00	4,00	3,00					
155	Jumlah Kegiatan Capacity Building TP PKK yang dilaksanakan	Kali	-	-	1,00					
156	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	Laporan				1,00	1,00	1,00	100,00	

No	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Relalisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Kesejahteraan Keluarga									

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPPA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :

- 1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- 2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil pengukuran kinerja DPMPPA Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	NILAI CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	99.68
		1 Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	99.12
2	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak		Kategori Kota Layak Anak	na
		2 Meningkatnya Skor Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	na
3	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	102.81
		3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	99.28
		4 Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	105.45

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja IKU DPMPPA Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah 101.26%, DPMPPA Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil karena semua target IKU sasaran strategis yang telah ditetapkan dicapai dengan sangat baik.

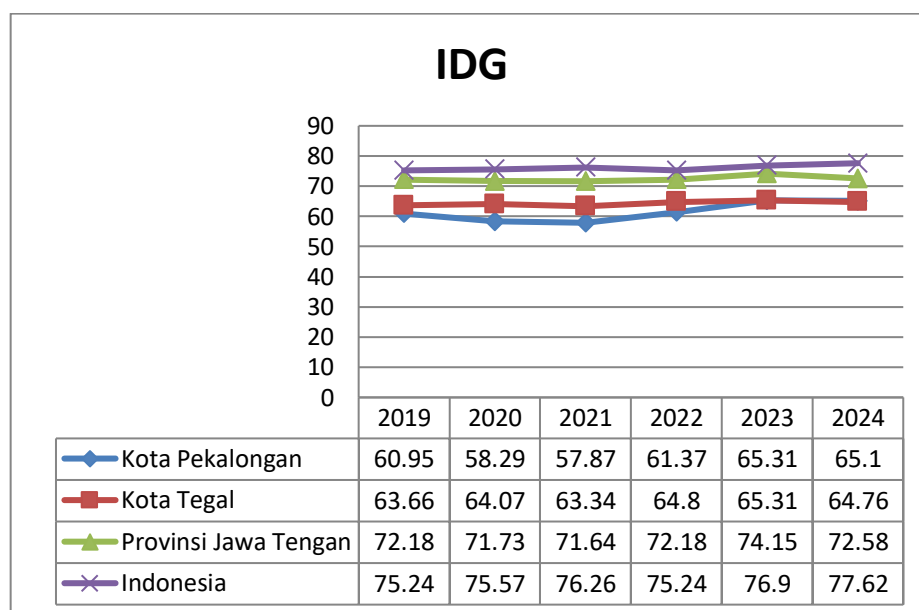
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 n-1	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			65,31	65,31	65,31		65.10		65,31		
2	Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG			28,56	28,56	28,56		28.31		28,56		
3	Kategori Kota Layak Anak			Nindya	Nindya	Nindya		na		Nindya		
4	Skor Kota Layak Anak			769,80	769,90	769,90		na		769,90		
5	Indeks Kepuasan Masyarakat			95,45	95,55	95,65		98,13		95,65		
6	Nilai SAKIP OPD			83,35	83,45	83,55		82,75		83,55		
7	Persentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat			9,02	9,49	10,00		9,51		10,00		

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DPMPPA Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami penurunan, kemudian mulai tahun 2022 mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini.



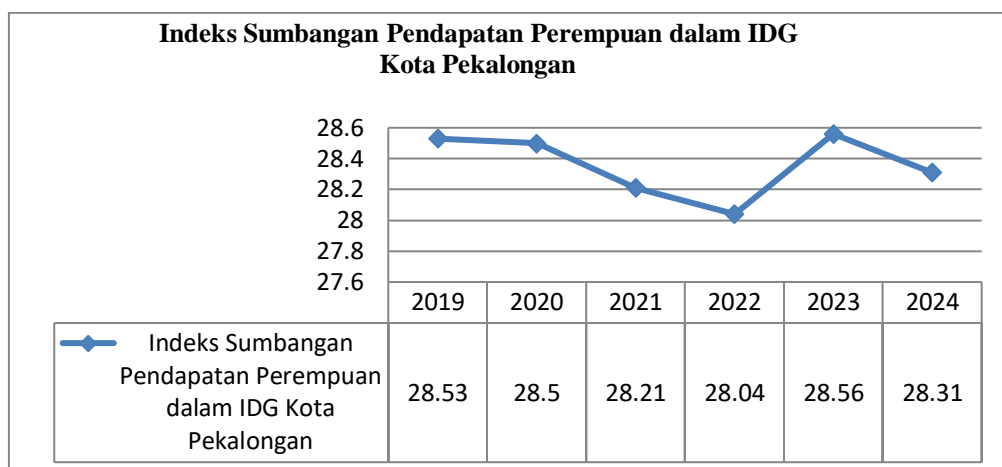
Sumber : BPS, 2025

Tahun 2024 IDG Kota Pekalongan lebih tinggi dari Kota Tegal, namun jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, sepanjang tahun 2019-2024 nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata.

### 2. Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG

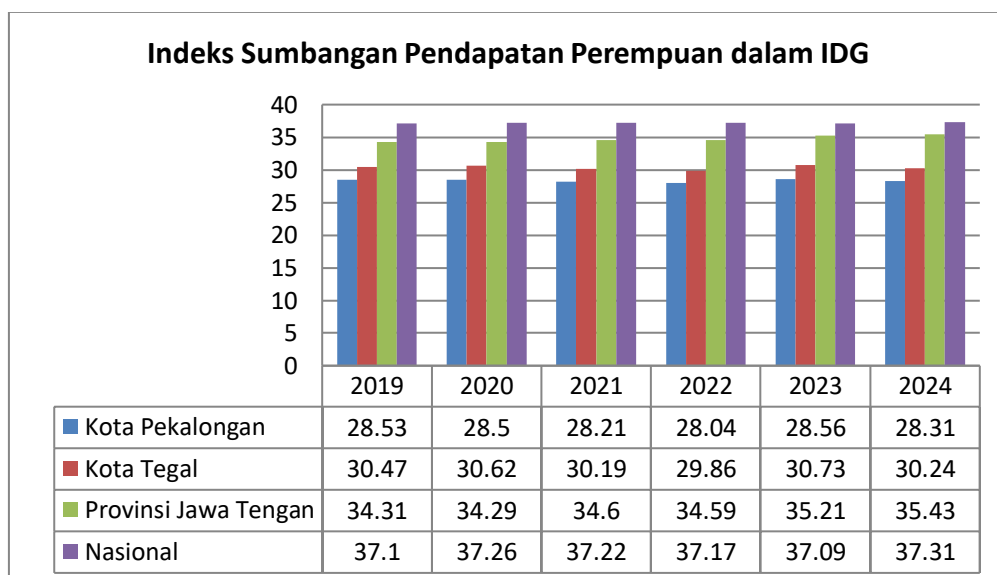
Indeks Sumbangan pendapatan perempuan merupakan salah satu dari indikator yang dipakai untuk menghitung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Setelah mengalami kenaikan di tahun 2023 di tahun 2024 Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan kembali mengalami penurunan yaitu 0.25 dibandingkan tahun 2023, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS rilis, 2025

Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam IDG Kota Pekalongan lebih rendah jika dibandingkan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:



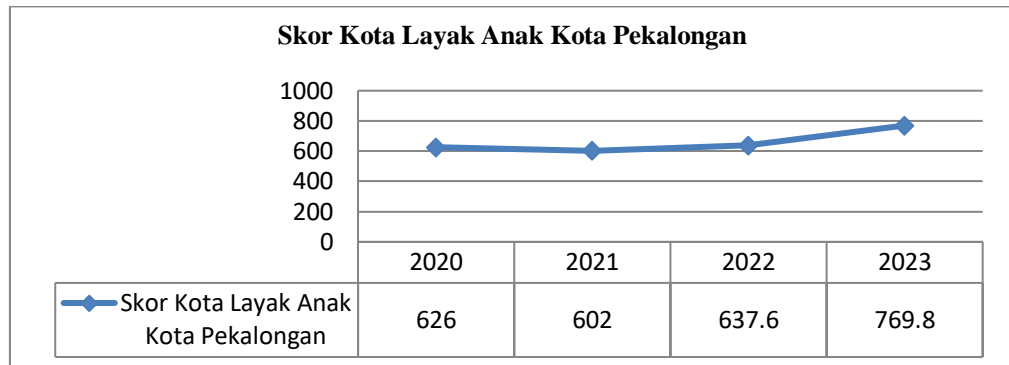
Sumber : BPS rilis, 2025

### 3. Kategori Kota Layak Anak

Kategori Kota Layak Anak merupakan penghargaan yang diberikan atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI. Tahun 2023, penghargaan Kota Layak Anak meningkat dengan kategori Nindya, yang sebelumnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Madya. Hal tersebut dikarenakan komitmen bersama Walikota Pekalongan dengan OPD terkait dan stakeholder, maupun peran LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) dan PPKBM PUSPAGA EIPePar berupapelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak serta pusat pembelajaran keluarga.

#### 4. Skor Kota Layak Anak

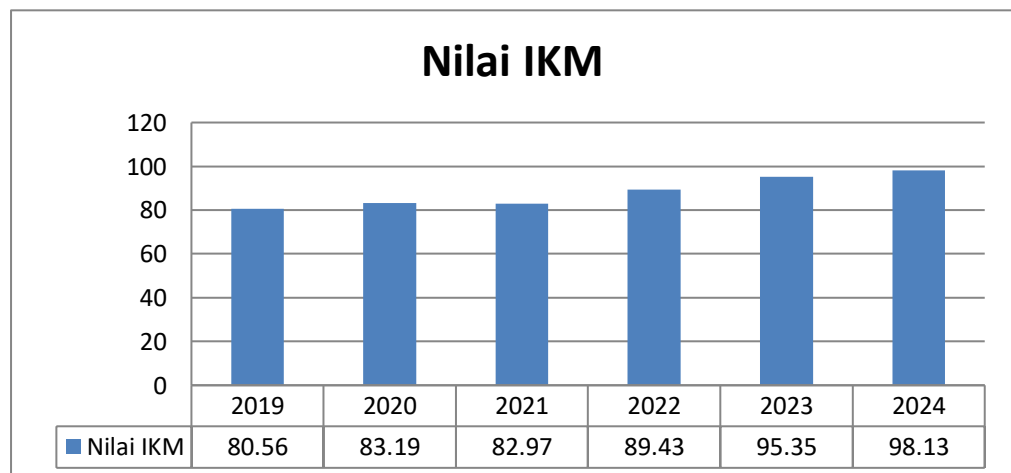
Skor Kota Layak Anak adalah skor yang diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI tentang Kota Layak Anak.



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

#### 5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan. Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.



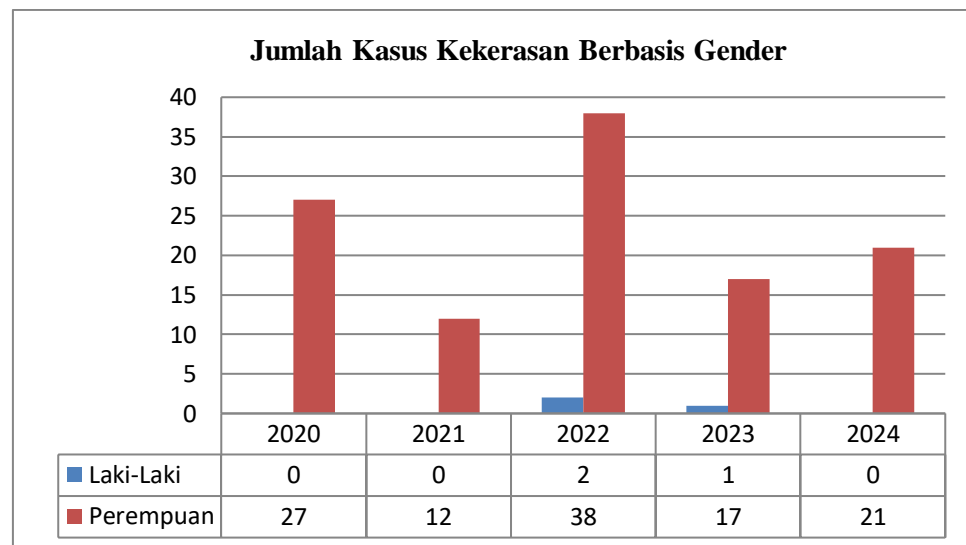
Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2025

Dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di DPMPPA Kota Pekalongan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang dilaksanakan di LP-PAR. LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja) yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan

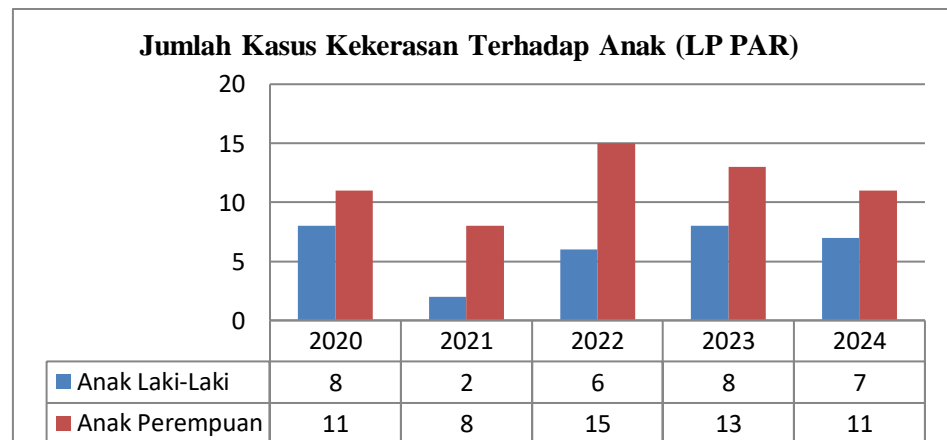
perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Selain itu tahun 2021 di bentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan nama PPKBM “PUSPAGA ELPePar” (Empati, Luwes, Peduli, dan Partisipasi) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 463/0013 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga.

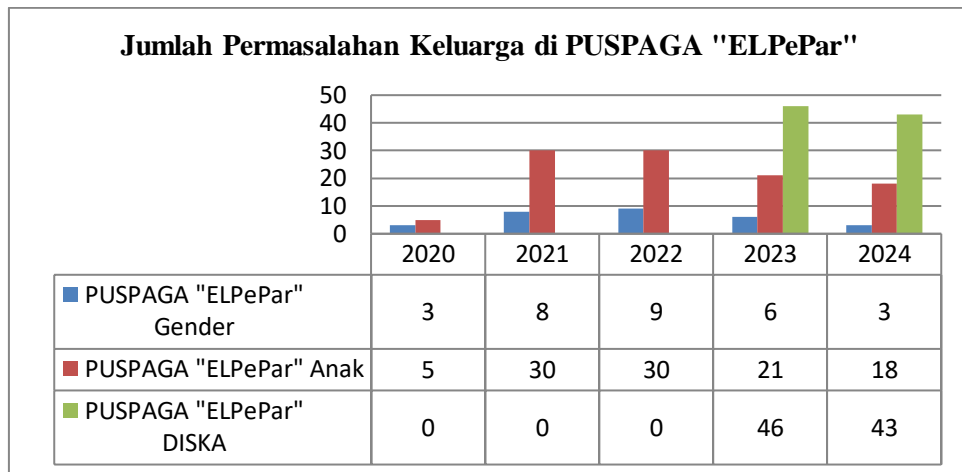
Dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dan PPKBM PUSPAGA “ELPePar”, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan maupun layanan pembelajaran keluarga di Kota Pekalongan dapat terlayani dan tertangani 100 %.



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025



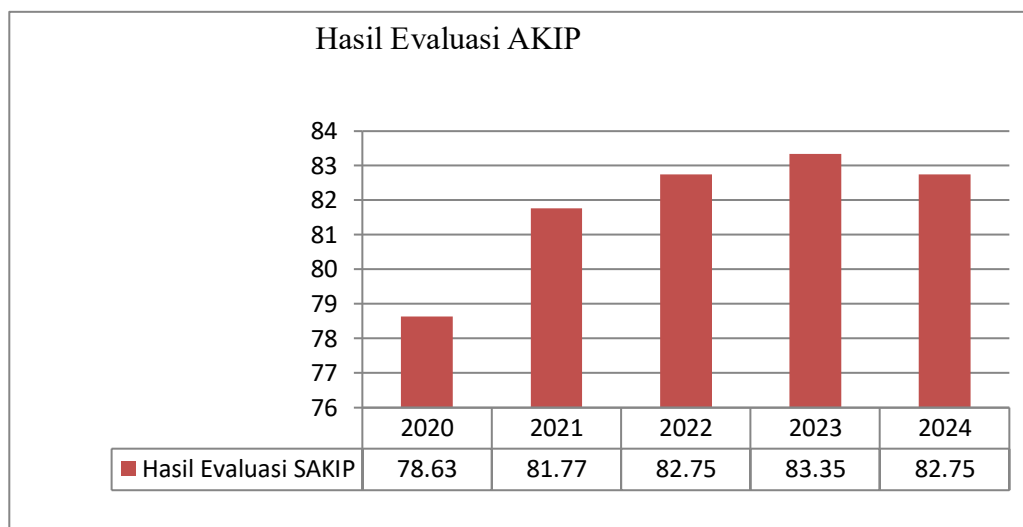
Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PUSPAGA GENDER</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
Laki-laki	-	-	-	3	-
Perempuan	3	8	9	3	3
<b>PUSPAGA ANAK</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
Laki-laki	2	14	10	8	10
Perempuan	3	16	20	13	8
<b>PUSPAGA DISKA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46</b>	<b>43</b>
Laki-laki	-	-	-	3	8
Perempuan	-	-	-	43	35

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 202

## 6. Nilai SAKIP OPD

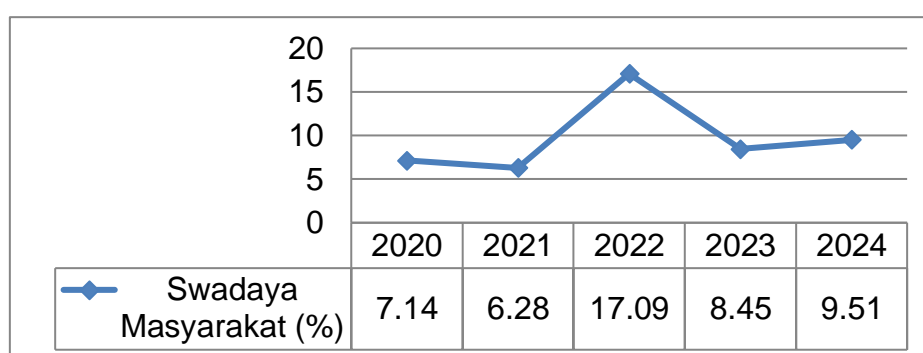
Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Komponen evaluasi meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja. Nilai Evaluasi AKIP DPMPPA Kota Pekalongan, dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2025, diolah

### 7. Prosentase Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan sumber daya manusia dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dengan tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Capaian swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut, capaian swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

Tahun	Jumlah Kelurahan	Jumlah Anggaran (Rp)	Swadaya Masyarakat (Rp)	Prosentase (%)
2020	17	839.724.500	59.935.400	7.14
2021	27	4.332.379.400	272.125.750	6.28
2022	27	2.217.366.000	378.970.906	17.09
2023	27	4.005.082.000	338.567.000	8,45
2024	27	2.792.043.000	265.579.100	9,51

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2025, diolah

### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi DPMPPA Kota Pekalongan adalah :

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - a. Jumlah SDM di DPMPPA Kota Pekalongan belum memadai sesuai tugas dan fungsi;
  - b. Sarana dan prasarana kantor belum memadai/layak;
  - c. Tata kelola keuangan belum sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. Pelayanan informasi publik belum optimal.
2. Permasalahan terkait kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat :
  - a. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan kelurahan;
  - b. Menurunnya kesadaran dan kepedulian masyarakat perkotaan terhadap lingkungan;
  - c. Pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam hal Teknologi Tepat Guna (TTG) masih kurang;
  - d. Potensi nilai adat istiadat masyarakat belum diberdayakan secara optimal.
3. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak:
  - a. Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Indeks Pemberdayaan Gender masih rendah;
  - b. Perangkat daerah dan stakeholder terkait kurang memahami implementasi pengarusutamaan hak anak;
  - c. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. Peran kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal;

#### **Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat di dukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM yang handal dan visioner.
- b. Upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan di Kota Pekalongan.
- c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses pemberdayaan

secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan khususnya di Kota Pekalongan

- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan berkelanjutan.
- e. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- f. Kelembagaan pengarusutamaan hak anak belum berjalan secara efektif dalam upaya pemenuhan, penghargaan, dan perlindungan hak anak;
- g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- h. Upaya kelembagaan perlindungan anak terhadap pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Membangun jejaring dan kerjasama dengan komunitas, lembaga kemasyarakatan, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DPMPPA Kota Pekalongan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan global;
- b. Kebijakan pengarusutamaan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah;
- c. Kebijakan pengarusutamaan hak anak telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pemenuhan dan perlindungan hak anak;
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- e. Banyaknya potensi organisasi/lembaga kemasyarakatan, komunitas, media massa, dunia usaha dan perguruan tinggi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

### **Isu Strategis**

Isu- isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan kurun waktu 2026-2029, adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam mendukung kualitas pelayanan publik;
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Belum optimalnya kesetaraan gender;
4. Belum optimalnya kualitas pemenuhan hak anak;
5. Masih Rendahnya ketrampilan pengasuhan orang tua terhadap anak;
6. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Strategi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam menghadapi isu-isu tersebut, adalah :

1. Penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender;
2. Fasilitasi pemberdayaan perempuan;
3. Penyediaan layanan perlindungan perempuan;
4. Penyediaan layanan PUSPAGA;
5. Sinergitas antar perangkat daerah;
6. Jejaring dan kerjasama dengan komunitas, organisasi/lembaga kemasyarakatan, media masa, dunia usaha dan perguruan tinggi;
7. Penyediaan layanan perlindungan anak;
8. Peningkatan fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan;
9. Peningkatan kinerja administrasi kelurahan;
10. Peningkatan partisipasi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, system pengendalian internal pemerintah dan evaluasi kinerja perangkat daerah

#### **2.4. Review Terhadap RKPD**

Review terhadap RKPD dapat dilihat dalam tabel 2.3, sebagai berikut :

Tabel :2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

**OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7
1,	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	11,09 persen	89.364.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Teradvokasi	14.29 persen	89.364.000
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16.67 persen	7.207.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang didampingi pelaksanaan PUG	100 persen	7.207.000
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 laporan	7.207.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	3 laporan	7.207.000
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Masyarakat/ Lembaga Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	40,00 persen	43.171.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan Yang Mendapatkan Advokasi Pemberdayaan Perempuan	100 persen	43.171.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
	2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pekalongan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	70 orang	43.171.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Pekalongan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	81 orang	43.171.000
	3	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita</b>	<b>100 persen</b>	<b>38.986.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita</b>	<b>100 persen</b>	<b>38.986.000</b>
	3	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 lembaga	38.986.000	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 lembaga	38.986.000
2,		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)</b>	<b>15,01 persen</b>	<b>93.041.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>	<b>18,46 rasio per 100.000</b>	<b>93.221.000</b>
	4	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>100 persen</b>	<b>28.650.000</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>100 persen</b>	<b>28.650.000</b>

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
	4	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	28.650.000	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	28.650.000
	5	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)</b>	<b>100 persen</b>	<b>64.391.000</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani</b>	<b>100 persen</b>	<b>64.571.000</b>
	5	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 orang	64.391.000	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 orang	64.571.000
3,							<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>		<b>Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani</b>	<b>100 persen</b>	<b>23.900.000</b>
	6						<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase kasus permasalahan keluarga yang terlayani</b>	<b>100 persen</b>	<b>23.900.000</b>
	6						Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	25 orang	21.175.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7		
		7				Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	50 orang	2.725.000		
4,			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)</b>	<b>55,56 persen</b>	<b>200.434.000</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>Skor Kota Layak Anak</b>	<b>769,9 persen</b>	<b>176.534.000</b>
	7		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase forum anak yang aktif</b>	<b>40,63 persen</b>	<b>200.434.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Ketercapaian Pendampingan Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>100 persen</b>	<b>176.534.000</b>
		8	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	94.753.000	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	94.753.000
		9	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 lembaga	91.956.000	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 lembaga	68.056.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
	10	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 lembaga	13.725.000	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 lembaga	13.725.000
5,		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>persentase pengaduan kasus anak yang terlayani</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>72.544.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>persentase pengaduan kasus anak yang terlayani</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>72.544.000</b>
	8	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)</b>	100.00 Persen	<b>18.900.000</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	100.00 Persen	<b>18.900.000</b>
	11	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	80 orang	18.900.000	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	80 orang	18.900.000
	9	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota ( IKK Outcome)</b>	100.00 Persen	<b>40.284.000</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota ( IKK Outcome)</b>	100.00 Persen	<b>40.284.000</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
	12	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 orang	40.284.000	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	12 orang	40.284.000
	10	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	100.00 Persen	<b>13.360.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	100.00 Persen	<b>13.360.000</b>
	13	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kota Pekalongan	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	50 orang	13.360.000	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	Kota Pekalongan	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	27 orang	13.360.000
6,		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>3.443.253.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>3.799.095.000</b>
	11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	15.762.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	15.762.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
	14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.204.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.204.000
	15	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.558.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.558.000
	16	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dokumen	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 dokumen	12.000.000
12		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	100.00 Persen	<b>2.767.072.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>	100.00 Persen	<b>3.121.822.000</b>
	17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	2.726.098.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	3.080.848.000
	18	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	39.530.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	39.530.000
	19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.444.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.444.000
13		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	100.00 Persen	<b>3.650.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	100.00 Persen	<b>3.650.000</b>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
	20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3.650.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	3.650.000
	<b>14</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	100.00 Persen	<b>202.205.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>	100.00 Persen	<b>202.205.000</b>
	21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.710.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.710.000
	22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	44.952.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	44.952.000
	23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2.050.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	2.050.000
	24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	38.244.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	38.244.000
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	4.380.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	4.380.000
	26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.530.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.530.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 orang	108.339.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 orang	108.339.000
	<b>15</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100.00 Persen	<b>307.939.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100.00 Persen	<b>309.031.000</b>
	28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2.520.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2.520.000
	29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	107.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	107.400.000
	30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	198.019.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	199.111.000
	<b>16</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100.00 Persen	<b>146.625.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100.00 Persen	<b>146.625.000</b>
	31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 unit	71.960.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 unit	71.960.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
	32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	60.175.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	60.175.000
	33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 unit	14.490.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 unit	14.490.000
7,		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>337.468.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan</b>	<b>100,00 persen</b>	<b>337.468.000</b>
	17	<b>Fasilitas Kerja Sama antar Desa</b>		<b>Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan</b>	11.11 persen	<b>337.468.000</b>	<b>Fasilitas Kerja Sama antar Desa</b>		<b>Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan</b>	20 persen	<b>337.468.000</b>
	34	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	337.468.000	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	337.468.000
8,		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"</b>	<b>92,59 persen</b>	<b>43.792.000</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"</b>	<b>100 persen</b>	<b>43.792.000</b>
	18	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase kinerja administrasi kelurahan</b>	100.00 persen	<b>43.792.000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase kinerja administrasi kelurahan</b>	100.00 persen	<b>43.792.000</b>
	35	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	43.792.000	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	43.792.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
9,			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,82 persen	727.980.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Fasilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100 persen	878.880.000
	19		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100 persen	727.980.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas	100 persen	878.880.000
		36	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	113.286.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	113.286.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	5	4	6	7	3	5	4	6	7	
37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	53.654.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	53.834.000	
38	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	49.770.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	49.770.000	
39	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	34.980.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	34.980.000	
40	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	476.290.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	627.010.000	
<b>JUMLAH</b>					<b>5.007.876.000</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>5.514.798.000</b>

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada tahun 2026 melaksanakan 2 Urusan Bidang, 9 Program, 19 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang terkait dengan program dan kegiatan DPMPPA. Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.

#### 2) Program Perlindungan Perempuan :

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota :
  - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota.

#### 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga :

1. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
  - Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota;

- Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota
  - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota;
- 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) :
1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
    - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 5) Program Perlindungan Khusus Anak :
1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota;
  2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah :
    - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota;
  3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus :
    - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Desa :
  1. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, dengan sub kegiatan :
    - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota.
- 2) Program Administrasi Pemerintahan Desa :
  1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan :
    - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat :

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

**c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

- Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dalam pelaksanaan MUSRENBANG baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota senantiasa ditekankan perlunya memprioritaskan kegiatan atas dasar 'kebutuhan' dan bukan 'keinginan'. Disamping itu juga di prioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdampak besar terhadap kenaikan IPM dan kegiatan yang mendukung terwujudnya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan.

Namun dalam kenyataannya masih banyak usulan kegiatan dari masyarakat lebih padapemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan mengesampingkan usulan berupa pemberdayaan masyarakat, meskipun pada kenyataannya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut sangat mendukung kenaikan IPM maupun terwujudnya Visi –Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekalongan.

Untuk kedepan, diharapkan usulan dari masyarakat ( tingkat RT/ kelurahan) mengakomodir usulan baik sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan 'kebutuhan' masyarakat dibanding 'keinginan' masyarakat.

Tabel 2.4 Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026  
Kota Pekalongan

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		<b>NIHIL</b>			

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2026, merupakan tahun pertama RPJMD Kota Pekalongan. Dalam kerangka Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan pentahapan pembangunan lima tahunan pertama. Oleh karena itu, dalam penyusunannya harus tetap mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045. Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD.

Selain itu, RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut pada dasarnya juga merupakan kelanjutan atas tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dengan demikian, selain mencermati berbagai kondisi makro yang berasal dari data-data primer dan sekunder, juga menjadi hal pokok untuk melakukan evaluasi atas capaian RPJMD Tahun 2025-2029 khususnya terkait dengan rencana pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2025-2045. Hal ini penting agar lebih dapat menjamin keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045.

Selain upaya sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan dengan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) serta pemerintahan di Kabupaten/Kota sekitar, perencanaan pembangunan juga harus merespon dinamika yang terjadi baik dalam skala lokal, regional, nasional juga global. Kecenderungan yang terjadi dalam skala lokal, regional, dan nasional secara normatif lebih dapat ditelusuri melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Namun dalam skala global, selain isu-isu yang sekarang ini sedang disikapi oleh berbagai institusi, baik institusi pemerintah, akademisi, swasta, ataupun masyarakat, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika lain yang sewaktu-waktu akan muncul di waktu yang akan datang.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan lanjutan dari pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2021-2025. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem

perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan tahun 2025-2045, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2025-2029 yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah

**“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan  
Berlandaskan Akhlaqul Karimah”**

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mewujudkan pencapaian misi-1 yaitu Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif dan sineris sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 dan misi-5 yaitu Peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak Kota Pekalongan, adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender;
2. Peningkatan pemahaman perempuan melalui advokasi PUG;
3. Peningkatan layanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak;
4. Melakukan advokasi, pendampingan dan konsultasi keluarga;
5. Melaksanakan pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan;
6. Mewujudkan kualitas pemenuhan hak anak melalui lembaga pemenuhan hak anak;
7. Peningkatan partisipasi anak dalam kelembagaan forum anak;
8. Melaksanakan advokasi kelurahan layak anak;
9. Fasilitasi TMMD;
10. Monitoring dan evaluasi perkembangan kelurahan kelurahan secara berkala;
11. Pelatihan, pembinaan dan evaluasikinerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
12. Pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja fasilitator pemberdayaan masyarakat;
13. Penjaringan Kader Pemberdayaan Masyarakat;

14. Fasilitasi TTG, gotong royong masyarakat dan TP PKK Kota Pekalongan
15. Penyusunan dokumen perencanaan dan sistem pengendalian internal pemerintah yang berkualitas;
16. Monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara berkala.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2025-2029, tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Menurunkan angka ketimpangan gender;
4. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak.

Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya peran lkk dalam pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas pembangunan gender;
4. Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak.

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### **Pencapaian visi dan misi kepala daerah**

Dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan , yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD adalah

“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan  
Berlandaskan Akhlaqul Karimah”

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mewujudkan pencapaian misi-1 yaitu Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif dan sineris sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 dan misi-5 yaitu Peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### ***Pencapaian SDGs***

Salah satu tujuan dari SDGs yang termaksud didalam tujuan 16 untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua termasuk untuk anak dan perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Perlindungan anak melalui kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan melakukan salah satu kegiatan berupa pendampingan terhadap korban baik itu anak maupun terhadap perempuan. Pendampingan itu dimaksudkan agar kasus yang terjadi dapat selesai dengan tugas baik dari sisi hukum maupun psikologis. Namun demikian upaya tersebut bukan tidak menemui kendala. Beberapa kasus yang secara nyata sudah dapat dibuktikan namun karena memperhatikan norma yang ada dimasyarakat sehingga kasus ditarik.

Sebagai bahan untuk mengedukasi masyarakat, advokasi terhadap keluarga, korban dan masyarakat harus terus dilaksanakan. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh DPMPPA untuk mengedukasi masyarakat antara lain :

1. Melalui fasilitasi kota layak anak dilakukan pembentukan kelurahan layak anak yang termasuk didalamnya dilibatkan forum anak di setiap kelurahan sehingga setiap anak mempunyai wadah yang positif dan dan terhindar dari pergaulan yang negatif. Selain itu diharapkan adanya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak yang komprehensif;
2. Sosialisasi di tingkat kelurahan melalui dana kelurahan dimana DPMMPA diminta untuk menjadi narasumber. Diharapkan informasi tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak diketahui sampai dengan semua elemen masyarakat;
3. Bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk dapat mengurangi terjadinya kekerasan dan bullying terhadap anak di sekolah;
4. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka kolaborasi program kegiatan.

Melalui kegiatan dan upaya-upaya tersebut diharapkan terjadi penurunan kasus terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tertangani kasus yang terjadi secara tuntas.

### ***Pencapaian SPM***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa pelayanan dasar pada urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai SPM adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan mengampu *urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar*, yaitu :

1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pemberdayaan masyarakat dan desa.

***Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan***

Pada tahun 2026 jumlah program dan kegiatan yang diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan terdiri : 9 Program, 19 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan.

Lokasi kegiatan di seluruh Kota Pekalongan dengan sasaran antara lain masyarakat, lembaga/organisasi wanita, kelompok remaja, LKK, anak, perempuan.

Pagu anggaran Rp 5.514.798.000,00.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027, dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.514.798.000				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.514.798.000				
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				455.563.000				
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Teradvokasi		14.29 persen	89.364.000				
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang didampingi pelaksanaan PUG		100 persen	7.207.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Kota Pekalongan	3 laporan	7.207.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang Mendapatkan Advokasi Pemberdayaan Perempuan</b>		<b>100 persen</b>	<b>43.171.000</b>				
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Kota Pekalongan	81 orang	43.171.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita</b>		<b>100 persen</b>	<b>38.986.000</b>				
2.08.02.2.03.0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Kota Pekalongan	1 lembaga	38.986.000	Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		18,46 rasio per 100.000	93.221.000				
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota		100 persen	28.650.000				
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	3 dokumen	28.650.000	Dana Alokasi Umum			
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani		100 persen	64.571.000				
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	12 orang	64.571.000	Dana Alokasi Umum			
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Permasalahan Keluarga Yang Terlayani		100 persen	23.900.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.08.04.2.03</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kasus permasalahan keluarga yang terlayani</b>		<b>100 persen</b>	<b>23.900.000</b>				
2.08.04.2.03.0004	Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	25 orang	21.175.000				
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	50 orang	2.725.000				
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Skor Kota Layak Anak</b>		<b>769,9 persen</b>	<b>176.534.000</b>				
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ketercapaian Pendampingan Pemenuhan Hak Anak</b>		<b>100 persen</b>	<b>176.534.000</b>				
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	5 dokumen	94.753.000	Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kota Pekalongan	1 lembaga	68.056.000	Dana Alokasi Umum			
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kota Pekalongan	2 lembaga	13.725.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>persentase pengaduan kasus anak yang terlayani</b>		<b>100,00 persen</b>	<b>72.544.000</b>				
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>		100.00 Persen	<b>18.900.000</b>				
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kota Pekalongan	80 orang	18.900.000	Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota ( IKK Outcome)		100 persen	40.284.000				
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	12 orang	40.284.000	Dana Alokasi Umum			
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		100 persen	13.360.000				
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Kota Pekalongan	27 orang	13.360.000	Dana Alokasi Umum			
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.059.235.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah		100,00 persen	3.799.095.000				
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100.00 Persen	15.762.000				
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.204.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.558.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 dokumen	12.000.000	Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</b>		100.00 Persen	<b>3.121.822.000</b>				
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	19 orang	3.080.848.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 laporan	39.530.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 laporan	1.444.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.13.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		100.00 Persen	<b>3.650.000</b>				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan	1 paket	3.650.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</b>		100.00 Persen	<b>202.205.000</b>				
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	1.710.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	44.952.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	2.050.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	38.244.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan	13 paket	4.380.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	1 dokumen	2.530.000	Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	75 orang	108.339.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100.00 Persen	<b>309.031.000</b>				
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	4 laporan	2.520.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 laporan	107.400.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 laporan	199.111.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100.00 Persen	<b>146.625.000</b>				
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	16 unit	71.960.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	2 unit	60.175.000	Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	52 unit	14.490.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan</b>		<b>100 persen</b>	<b>337.468.000</b>				
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitas Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan</b>		20 persen	<b>337.468.000</b>				
2.13.03.2.01.0002	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	4 dokumen	337.468.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"</b>		<b>100 persen</b>	<b>43.792.000</b>				
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase kinerja administrasi kelurahan</b>		100.00 persen	<b>43.792.000</b>				
2.13.04.2.01.0018	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Pekalongan	2 dokumen	43.792.000	Dana Alokasi Umum			
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Fasilitas Penataan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Kelurahan (LKK)</b>		<b>100 persen</b>	<b>878.880.000</b>				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas		14,29 persen	878.880.000				
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Pekalongan	1 dokumen	113.286.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Pekalongan	1 lembaga	53.834.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Pekalongan	1 laporan	49.770.000	Dana Alokasi Umum			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun TAHUN 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Pekalongan	1 laporan	34.980.000	Dana Alokasi Umum			
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	1 dokumen	627.010.000	Dana Alokasi Umum			
<b>J U M L A H</b>					<b>5.514.798.000</b>				

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2026, sebagai berikut :

NO			Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1			2	3	4
				<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>5.514.798.000</b>
			<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>5.514.798.000</b>
			<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>455.563.000</b>
<b>1,</b>			<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>89.364.000</b>
	<b>1</b>		<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>7.207.000</b>
		<b>1</b>	<b>2.08.02.2.01.0007</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	7.207.000
	<b>2</b>		<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>43.171.000</b>
		<b>2</b>	<b>2.08.02.2.02.0001</b>	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	43.171.000
	<b>3</b>		<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>38.986.000</b>
		<b>3</b>	<b>2.08.02.2.03.0007</b>	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	38.986.000
<b>2,</b>			<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>93.221.000</b>

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
4	2.08.03.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.650.000</b>
	4	2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	28.650.000
5	2.08.03.2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>64.571.000</b>
	5	2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	64.571.000
3	2.08.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>23.900.000</b>
6	2.08.04.2.03	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23.900.000</b>
	6	2.08.04.2.03.0004 Layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	21.175.000
	7	2.08.04.2.03.0006 Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	2.725.000
4,	2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>176.534.000</b>
7	2.08.06.2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>176.534.000</b>
	8	2.08.06.2.02.0006 Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	94.753.000
	9	2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	68.056.000
	10	2.08.06.2.02.0009 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	13.725.000
5,	2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>72.544.000</b>

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
8	2.08.07.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.900.000</b>
	11 2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	18.900.000
9	2.08.07.2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.284.000</b>
	12 2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	40.284.000
10	2.08.07.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.360.000</b>
	13 2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.360.000
	2.13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>5.059.235.000</b>
6,	2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.799.095.000</b>
11	2.13.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.762.000</b>
	14 2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.204.000
	15 2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000
	16 2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000
12	2.13.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.121.822.000</b>
	17 2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.080.848.000
	18 2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.530.000
	19 2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.444.000

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4
13	2.13.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.650.000</b>
	20 2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.650.000
14	2.13.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>202.205.000</b>
	21 2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.710.000
	22 2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.952.000
	23 2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.050.000
	24 2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.244.000
	25 2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.380.000
	26 2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.530.000
	27 2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.339.000
15	2.13.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>309.031.000</b>
	28 2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.520.000
	29 2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.400.000
	30 2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.111.000
16	2.13.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>146.625.000</b>
	31 2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.960.000
	32 2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.175.000
	33 2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.490.000
7,	2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>337.468.000</b>
17	2.13.03.2.01	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>337.468.000</b>
	34 2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	337.468.000

NO		Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1		2	3	4	
8,		2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>43.792.000</b>	
	18	2.13.04.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>43.792.000</b>	
		35	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	43.792.000
9,		2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>878.880.000</b>	
	19	2.13.05.2.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>878.880.000</b>	
		36	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	113.286.000
		37	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	53.834.000
		38	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	49.770.000
		39	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	34.980.000
		40	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	627.010.000
			<b>J U M L A H</b>	<b>5.514.798.000</b>	

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun sebagai upaya pencapaian Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan.


Memedomani dokumen perencanaan diatas, maka prioritas pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan pada tahun 2026, adalah:

1. Optimalisasi pengarusutamaan gender;
2. Optimalisasi kualitas pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
4. Peningkatan layanan kualitas hidup keluarga;
5. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pembangunan;
6. Peningkatan kinerja organisasi.

Segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) secara konsisten dapat mengupayakan tercapainya sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkeadilan, penganggaran yang responsif gender serta mewujudkan pemerintahan yang amanah.

Akhirnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2026 dapat sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditegaskan dalam RKP Nasional 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, 4 Agustus 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

  
PUJI WINARTI, SKM, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700502 199501 2 001